

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aslinda. (2023). *Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: K-Media.
- Hasibuan, H. M. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilliant.
- Sugandi, Y. S. (2011). *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri, S. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-KP2W Lemlit Unpad.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: MedPress.

JURNAL

- Ermanita, R. (2015). Perencanaan Strategik Sumber Daya Dosen Pada universitas Syiah Kuala. *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Universitas Syiah Kuala*, III(3), 147-162.
- Lasambow, C. M. (2013). Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan Tinggi dalam Bentuk Badan Hukum Pendidikan. *Jurnal Sigma-Mu*, V(2), 37-54.

- Maisyaroh, R., & Yanuardi. (2017). Implementasi Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). *Jurnal Adinegara*, VI(6), 640-649.
- Prastika, L., & Kismartini. (2017). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, VI(2), 498-514.
- Retnoningsih, Y. D., & Marom, A. (2017). Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah. *Journnal of Public Policy and Management Review*, VI(2), 482-497.
- Sudrajat, M. I., & Rostyaningsih, D. (2018). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 Kota Semarang dengan Studi Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Semarang (Studi Kasus Pasar Karangayu). *Journal of Public Policy and Management Review*, VII(1), 54-68.
- Supriyanto, U., Arenawati, & Cadith, J. (2021). Implementasi Kebijakan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Millennial Enterpreneur. *Jurnal Governasi*, VII(1), 39-50.
- Utama, K. W. (2017). Otonomi Pengelolaan Sumberdaya Manusia PTN-BH. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, XLVI(1), 92-99.

PERATURAN

- Pemerintah RI. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*.
- Pemerintah RI. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum*.
- Pemerintah RI. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum*.
- Pemerintah RI. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro*.
- Universitas Diponegoro. (2017). *Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Bantuan Studi Lanjut Bagi Pegawai Pelajar yang Pendanaannya Berseumber dari Dana Selain APBN pada Universitas Diponegoro*.

Universitas Diponegoro. (2020). *Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Bantuan Studi Lanjut Bagi Pegawai Pelajar yang Pendanaannya Bersumber dari Dana Selain APBN pada.*

Universitas Diponegoro. (2022). *Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.*

DOKUMEN

Kemenristekdikti. (2019). *Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018.* Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Universitas Diponegoro. (2015). *Rencana Induk Pengembangan Universitas Diponegoro Tahun 2015-2039.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Universitas Diponegoro. (2015). *Rencana Strategis Universitas Diponegoro Tahun 2015-2019.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Universitas Diponegoro. (2018). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Diponegoro tahun 2017.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Universitas Diponegoro. (2019). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Diponegoro Tahun 2018.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Universitas Diponegoro. (2020). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Diponegoro Tahun 2019.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Universitas Diponegoro. (2020). *Rencana Strategis Universitas Diponegoro tahun 2020-2024.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Universitas Diponegoro. (2021). *Laporan Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Universitas Diponegoro. (2022). *Laporan Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Universitas Diponegoro. (2023). *Laporan Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2022.* Semarang: Universitas Diponegoro.